

Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Armuyza Yunita^{1*}, Wiene Surya Putra², Devy Anggreny³
STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah¹²³, Binjai, Indonesia
Email: *armuyza78@gmail.com*

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol:1,Nomor:2,Desember 2023 Halaman :652-657	<i>Education is a very important thing for humans which is a benchmark for achieving success. Education is very influential and has an impact on humans themselves as well as on the nation and state. This proves that a country needs successors or people who have higher education, in order to produce a generation that is always thinking and smart at work, careful and thorough, has a creative and innovative mindset and also people who have character, enthusiasm, virtuous, polite, and highly enthusiastic. In the world of education, every country has a vision and mission to achieve a goal. Where the hope is that it will run well or can be said to be successful if every deviation is in accordance with the education system or rules properly. Which will later have an influence in creating a generation that has the enthusiasm to advance the nation and state and in terms of character and intelligence that will create a nation capable of competing superiorly in national competition. One of the education policies is the professional teacher development policy. Because teachers will be the main benchmark in creating the success of their generation. Where the basic concept of educational policy is very important to achieve educational goals.</i>
Keywords: Concept Policy Education	

Abstrak

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia yang menjadi tolak ukur untuk meraih suatu keberhasilan. Pendidikan sangat berpengaruh dan berdampak pada diri manusia itu sendiri serta bagi bangsa maupun negara. Hal tersebut membuktikan bahwa suatu negara perlu penerus atau orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, agar dapat mencetak generasi yang selalu berfikir dan bekerja cerdas, cermat dan tuntas, memiliki pola pikir yang kreatif maupun inovatif dan juga orang-orang yang memiliki karakter, semangat, berbudi luhur, sopan santun, dan sifat antusias yang tinggi. Dalam dunia pendidikan setiap Negara memiliki visi misi untuk mencapai suatu tujuan. Dimana harapan tersebut akan dapat berjalan dengan baik atau dapat dikatakan berhasil manakala setiap perwujudan sesuai dengan sistem ataupun aturan pendidikan dengan baik. Yang nantinya akan berpengaruh dalam menciptakan generasi yang memiliki semangat untuk memajukan bangsa maupun negara dan dari segi karakter maupun kecerdasan yang akan menciptakan bangsa mampu bersaing unggul dalam persaingan bangsa. Kebijakan pendidikan yakni salah satunya adalah kebijakan pengembangan profesional guru. Sebab guru akan menjadi tolak ukur utama dalam menciptakan keberhasilan generasinya. Dimana konsep dasar kebijakan pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting guna mencapai tujuan dalam pendidikan.

Kata Kunci : Konsep, Kebijakan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Manusia akan mendapat berbagai pendidikan di setiap lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan sampai pada lingkungan sekolah. Seorang anak akan mendapatkan pendidikan pertama dari lingkungan keluarga yang berupa pendidikan etika, moral, hingga pendidikan akhlak. Melalui kebijakan pendidikan, masyarakat akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Karakter seseorang akan terbentuk dengan sendirinya jika mendapatkan dorongan dari beberapa lingkungan yang telah disebutkan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah pendidikan guna meminimalisir hal-hal yang menyimpang dari suatu aturan sehingga kualitas pendidikan menjadi teratur dan terarah.

Berdasarkan kurikulum dan proses pembelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah para peserta didik terbentuk keterampilan mereka dalam hal akademik maupun non akademik serta sikap dan perilaku. Pendidikan merupakan kebutuhan utama manusia dalam menghadapi dan menjalani kehidupan nyata. Pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan karakter seseorang agar menjadi

orang yang berkualitas dimasa depan. Peran guru sangat dibutuhkan dalam mendukung kebijakan pendidikan di Indonesia. Guru harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Apapun yang dilakukan guru harus menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Itulah mengapa kompetensi kepribadian menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru (Setiawan, 2021). Sehingga melalui penelitian ini akan dijumpai bagaimana konsep dasar kebijakan pendidikan diharapkan dengan adanya kajian ini, dapat mengetahui pentingnya kebijakan dalam pendidikan.

Dengan demikian, fitalnya peranan kebijakan pendidikan dalam menentukan arah serta jalur proses pendidikan di suatu negara dalam menentukan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan, tentu sangatlah berdampak pada kualitas dari tingkat satuan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang diambil merupakan perubahan dari aspek pendidikan sebelumnya, yaitu perbaikan dalam tujuan, rencana, program-program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjadi pedoman ketika melakukan kegiatan atau mengambil keputusan (Danhas, 2021).

Maka dari itu usaha pemerintah dalam membangun pendidikan perlu dicermati serta dikawal oleh publik, karena dampaknya pendidikan ketika sudah memutuskan kebijakan maka dampak dari kebijakan itu akan luas bagi kehidupan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu perlu analisis kebijakan pendidikan perlu ada prinsip yang objektif sehingga dari analisis kebijakan pendidikan yang di hasilkan tidak semata-mata menyalahkan kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah yang sedang berkuasa saja, atau bahkan pihak lain yang berkuasa. Analisis kebijakan pendidikan ini harus bisa memberikan gambaran secara gamblang sehingga bisa mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kebijakan pendidikan (Farid, 2021).

Pelaku yang berperan dalam menetapkan suatu kebijakan yakni suatu kelompok atau perorangan yang memiliki tanggung jawab terhaap pendidikan. Kemudian konsep kebijakan pendidikan dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil akhir program kebijakan pendidikan dengan tujuantujuan kebijakan pendidikan. Sehingga, tak heran apabila kerap kita jumpai perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia, terlebih setiap bergantinya menteri pendidikan di Indonesia. Meskipun banyak pihak yang mengkritik tajam hal tersebut, namun sejatinya hal ini tidaklah salah. Karena hal tersebut merupakan salah satu upaya perbaikan kebijakan pendidikan Indonesia, yang hingga akhirnya bertujuan juga pada perbaikkan terhadap mutu pendidikan di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang didapatkan dari tulisan-tulisan para ahli dalam pendidikan, yang berkaitan kebijakan – kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan dan juga berupaya untuk menciptakan suatu perubahan kebijakan yang terjadi sesuai perkembangan zaman. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi awal bagi tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perubahan kebijakan dalam suatu negara. Subyek yang menjadi sumber utama adalah kebijakan pendidikan yang selama ini berjalan dengan memperhatikan kondisi saat membuat kebijakan pendidikan , hal itu didapatkan dengan menganalisa tulisan para ahli dalam pendidikan, dengan membaca buku dan jurnal yang terkait. Buku dan Jurnal digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menggabungkan data-data terkait kebijakan pendidikan dengan cara memahami dan menganalis sehingga dapat diambil dijadikan sebagai pokok pikiran untuk menjelaskannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan adalah kata bijak yang mendapat imbuhan. Kata bijak itu berarti menggunakan akal budinya; pandai; mahir (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan kata lain, orang yang bijak akan menentukan dan mengambil keputusan atas pertimbangan yang didasarkan pada suatu ilmu yang bermanfaat, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan satu maupun pihak lain. Akan terus dilakukan perbaikan dan dituntun agar mengikuti perkembangan jaman. Aspek-aspek yang dikaji sebagai bahan pertimbangan perbaikan suatu kebijakan pendidikan adalah pelaku dan implementasi kebijakan pendidikan (Majid, 2019).

Kemudian Konsep kebijakan pendidikan itu sendiri dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil akhir program kebijakan pendidikan dengan tujuan-tujuan kebijakan pendidikan. Walaupun banyak pihak yang mengkritik tajam hal tersebut, namun sejatinya hal ini tidaklah salah. Yang merupakan salah satu upaya dalam melakukan perbaikan kebijakan pendidikan Indonesia, guna bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Yoyo, 2019).

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*, yang bersumber dari bahasa Inggris. Secara etimologi kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani yang berarti polis yang artinya kota. Kebijakan merupakan sebuah putusan yang di buat untuk sebuah lembaga atau aparatur negara yang bertanggung jawab. Kebijakan merupakan suatu keputusan oleh pemerintah melalui hasil musyawarah dengan beberapa lembaga agar masyarakat bisa maju karenanya di ambil kebijakan yang dapat di putuskan dan memberikan jalan kehidupan bermasyarakat dari seluruh secara umum (Aziz, 2020).

Suatu kebijakan dapat dikatakan baik apabila banyak mengandung sumber manfaat untuk banyak orang dan tidak merugikan oleh banyak orang karena di dalam kebijakan di buat berdasarkan undang-undang yang jelas adanya. Sebagai sebuah konsep filosofis kebijakan adalah rangkaian prinsip atau keadaan yang diharapkan apabila dipandang sebagai sebuah produk, kebijakan akan dipandang sebagai rangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Akan tetapi apabila dipandang sebagai proses maka kebijakan akan dinilai dari cara kerja program dan mekanisme dalam mencapai tujuan yang di harapkan sehingga kebijakan dapat menjadi kerangka kerja, proses dan negosiasi dalam perumusan isu serta metode implementasi. (Alfirzan et al., 2021)

Adapun 5 Komponen Kebijakan tersebut diantaranya adalah:

1. Tujuan (*Goal*) merupakan sebuah hasil yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok dengan kurun waktu yang sudah disepakati. Tujuan merupakan langkah awal yang diambil sebelum merencanakan sebuah kebijakan. Tujuan kebijakan pendidikan yang baik hendaknya bersifat rasional sehingga mudah dijangkau oleh berbagai kalangan umum.
2. Rencana (*Plans*) merupakan tahap lanjutan sesudah menemukan tujuan yang akan dicapai. Rencana merupakan suatu gagasan atau merancang sesuatu hal untuk dapat meraih tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya sehingga proses manajemen dan kebijakan pendidikan lebih terarah dan jelas dalam pengimplementasian.
3. Program (*Programme*) merupakan proses atau sebuah kegiatan yang mana bentuk implementasi dari suatu yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Melakukan penerapan suatu program dalam kebijakan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan.
4. Keputusan (*Decision*) merupakan suatu hasil yang telah disepakati oleh program yang telah dibentuk sebelumnya. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pertimbangan terhadap beberapa alternatif yang telah dibuat ketika berada di tahap suatu program. Suatu keputusan kebijakan pendidikan hendaknya tidak ditentang oleh beberapa pihak.
5. Dampak (*Effects*) merupakan hal yang mungkin terjadi ketika kebijakan pendidikan tersebut diterapkan. Berbicara mengenai kebijakan pendidikan seringkali dikaitkan dengan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yang mana diharapkan dapat diterapkan di setiap sekolah yang ada sesuai dengan karakteristik kebijakan pendidikan (Elwijaya, 2021).

Karakteristik merupakan sebuah pernyataan yang dapat menonjolkan ciri khas dari suatu hal. Membicarakan suatu hal kebijakan ini bukan dianggap suatu hal yang remeh, namun hal ini harus benar-benar diperhatikan adanya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengesahkan suatu kebijakan ialah dengan memperhatikan hal kecil namun penting perannya seperti karakteristik kebijakan pendidikan. Karakteristik kebijakan pendidikan yang disebutkan meliputi 6 karakteristik diantaranya:

1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan wajib mempunyai tujuan. Untuk memberikan kontribusi secara nyata bagi pendidikan, kebijakan tersebut harus mempunyai target yang jelas dan tepat sasaran. Makna dari kebijakan itu sendiri, ditafsirkan sebagai politik, aturan, keputusan undang-undang, peraturan konvensi, kesepahaman serta rencana strategis lainnya. Dalam konteks yang lain

kebijakan ini tak hanya mengatur system operasional secara internal melainkan juga mengatur mengenai perihal fungsi secara konseptual diantara sistem.

2. Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan wajib dilaksanakan dengan aman, dan kondisi harus diciptakan agar kebijakan pendidikan diakui secara hukum dan diterapkan secara lokal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan wajib disesuaikan dengan syarat konstitusional nan berlaku di daerah agar sah dan resmi berlaku di daerah. Oleh karena itu, kami dapat mengusulkan kebijakan pendidikan yang sah.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sudah pasti dijadikan sebagai peduan umum yang memiliki nilai operasional agar dapat dilaksanakan, yang penting untuk memperjelas fungsi pendukung keputusan, serta kebijakan yang mau dicapai, dan juga untuk mencapai target pendidikan yang akan dicapai.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan harus dikembangkan dan juga diberdayakan oleh para ahli di bidangnya agar tidak merugikan pendidikan. Pengelola lembaga, pengelola pendidikan, serta politisi yang turut serta dalam pendidikan yakni komponen minimal dari kebijakan pendidikan.

5. Dapat di evaluasi

Kebijakan pendidikan pastinya tidak lepas atas realitas selanjutnya. Jika sudah baik perlu dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut, dan jika mengandung kesalahan perlu diperbaiki. Oleh karena itu, peduan pembentukan karakter dapat dengan evaluasi yang sederhana serta efisien.

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan juga merupakan sistem, sehingga perlu mempunyai sistem yang jelas dari berbagai aspek yang ingin diaturnya. Sistem tersebut juga harus sangat efektif, efisien dan berkelanjutan, sehingga kebijakan pendidikan tidak terstruktur secara pragmatis, diskriminatif serta rapuh karena sejumlah faktor yang hilang atau saling bertentangan. Hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama agar penerapannya tidak menimbulkan cacat hukum internal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu diintegrasikan secara eksternal ke dalam bidang kebijakan lainnya; politik politik; kebijakan moneter; bahkan di atas atau di bawah serta di bawah kebijakan pendidikan serta daya saing produk berbasis sumber daya di daerah (Abdul, 2021).

Di sisi lain, terdapat beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa kebijakan adalah perilaku sejumlah oknum (pemerintah) dalam sebuah bidang tertentu yang merupakan suatu deklarasi dengan dasar tertentu yang mengarahkan pada suatu program atau rencana tertentu. Dari semua pendapat yang ada kebijakan pendidikan dapat disimpulkan sebagai sebuah ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu seperti pemerintah maupun yang terlibat didalam pendidikan, kemudian ketetapan yang sudah disepakati dan dipertimbangkan dijadikan sebagai program yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan agar berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman.

Konsep Kebijakan pendidikan itu sendiri, dibuat dengan menyesuaikan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang tertera di Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional.

Tercapainya tujuan pendidikan nasional sangatlah berpengaruh bagi mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu, dalam menetapkan suatu kebijakan perlunya mengetahui terlebih dahulu bagaimana konsep kebijakan yang ingin ditetapkan yaitu dengan memperhatikan 5 komponen kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones supaya hasilnya dapat dirasakan oleh setiap kalangan dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud.

Kebijakan Pendidikan erat hubungannya dengan tujuan pendidikan. Hadirnya tujuan pendidikan diharapkan dapat memberikan arah yang jelas untuk dapat menentukan sebuah kebijakan pendidikan. Tak hanya tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan pun mempunyai tujuan agar lebih terstruktur serta terarah dalam pengambilan keputusan. Bahwasanya dengan adanya sebuah tujuan tentunya akan

memberi arah dalam hidup, dengan menetapkan suatu tujuan maka bakal jelas pula target yang akan mau digapai (Yanti, 2021).

Adanya suatu arah dalam menggapai suatu hal yang berkenaan dengan kebijakan pendidikan perlu adanya sebuah tujuan. Oleh karena itu, tujuan kebijakan pendidikan meliputi beberapa hal diantaranya yakni:

1. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan masyarakat

Kebijakan yang berdasar pada tingkatan masyarakat sendiri, dapat kita telusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Kemudian sebuah pendidikan disini mampu mengubah suatu individu jadi lebih baik sebelum ia di bimbing. Selanjutnya dalam pendidikan sendiri dilatih pula nilai-nilai kebikan kepada seseorang, maka dari hal tersebut nantinya individu-individu ini memahami mana yang dianggap itu baik dan juga mana yang dianggap itu buruk. Maka dari sini dapat dikatakan bahwasanya pendidikan ialah suatu langkah menyempurnakan harkat serta martabat manusia yang diusahakan secara kontinyu.

2. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan politisi

Dimana dalam sebuah tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan politisi ini dapat kita telusuri dari kontribusi pendidikan pada perkembangan politik dalam kedudukan sosial yang berbeda. Pendidikan disini menolong para peserta didik khususnya dalam membangun sikap serta keterampilan kewarganegaraan yang positif guna membentuk warga negara yang benar serta bertanggung jawab. Orang yang terpelajar diharapkan lebih memahami wewenang serta peranannya agar nantinya pandangannya serta kepribadiannya demokratis. Disisi lain juga, orang yang terpelajar diharapkan juga mempunyai kesadaran serta tanggung jawab khususnya pada bangsa dan juga negara yang mana lebih baik daripada orang nan kurang terpelajar.

3. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan ekonomi

Bahwasanya tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan ekonomi ini bisa kita telusuri berdasarkan adanya sebuah pandangan berkaitan dengan esensial pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang mana bisa kita lihat alasannya seperti di bawah ini:

- a) Pendidikan merupakan suatu sarana untuk perkembangan ekonomi, pendidikan disini dapat menolong siswa dalam memperoleh ilmu serta keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Maka terlihat bahwasanya semakin berpendidikannya seseorang, maka tingkatan penghasilan juga akan semakin baik, hal tersebut terjadi dikarenakan orang yang terpelajar jauh lebih produktif ketimbang orang yang kurang terpelajar.
- b) Investasi pendidikan disini tentunya akan memperoleh nilai balik nan lebih besar dibanding investasi fisik dari bidang lain. Nilai baik pendidikan merupakan tolak ukur antara jumlah anggaran yang dipakai untuk membiayai pendidikan berdasarkan pada jumlah penghasilan yang hendak diterima nantinya selepas seseorang terjun di dunia kerja (Kasmeni, 2020).

Fungsi dari kebijakan pendidikan ini semata-mata dibuat guna menjadi sebuah pedoman di dalam melakukan suatu tindakan, mengelola kegiatan dalam pendidikan, organisasi ataupun sekolah dengan masyarakat serta pemerintah guna menggapai suatu target yang sudah ditentukan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan disini merupakan garis umum di dalam melakukan tindakan terhadap pengambilan suatu keputusan pada semua tingkatan pendidikan ataupun organisasi.

KESIMPULAN

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan pasti mempunyai dasar yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi maupun kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Menetapkan suatu kebijakan pendidikan tidak dapat semata-mata langsung ditetapkan, akan tetapi perlunya memperhatikan akan dampak yang nantinya terjadi ketika kebijakan tersebut telah ditetapkan untuk menetapkan suatu kebijakan perlu memperhatikan 5 komponen kebijakan pendidikan

yaitu antara lain: *goals, plans, programme, decision, dan efect*. Tidak hanya komponen kebijakan namun 6 karakteristik kebijakan pendidikan juga memiliki peran penting bagi pendidikan.

Adanya kebijakan dalam pendidikan dapat memberikan peranan penting di dalam memberikan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Dengan adanya kebijakan dalam pendidikan itu sendiri, kita dapat mengetahui karakteristik suatu kebijakan yang memiliki dampak positif pada diri manusia, serta bangsa dan Negara. Suatu Negara membutuhkan manusia-manusia atau orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, agar dapat mencetak generasi yang selalu berfikir dan bekerja cerdas, cermat dan tuntas, memiliki karakter, semangat, berbudi luhur, sopan santun, dan sifat antusias yang tinggi untuk mencapai tujuan dalam pendidikan.

REFERENCES

- Abdul Rozak. "Kebijakan Pendidikan di Indonesia" 3, no. 25 (2021): 197–208
- Alfirzan, A. ., Nasri, Y. ., & Gistituati, N. . (2021). *Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 (1), 1521–1529. Guru. MAPPESONA : International Journal of Educational Management
- Ansori, Yoyo Zakaria, Indra Adi Budiman, dan Dede Salim Nahdi. "Islam Dan Pendidikan Multikultural." *Jurnal Cakrawala Pendas* 5, no. 2 (2019): 110–15. <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>
- Anisa Nuraida Rahmah, Aulia Farkhan, Umar Alwatasi, Farid Setiawan : *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan*, Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 5 (2022) <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Aziz, AA, Nurfarida, R., Budiyan, N., & Zakiah, QY (2020). *Model Analisis Kebijakan Pendidikan*. Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Danhas, Y. (2021). *Analisis Pengelolaan Dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran*. Publikasikan lebih dalam. <https://books.google.co.id/books?id=jl4kEAAAQBAJ>
- Elwijaya, Fadiyah, Vivi Mairina, dan Nurhizrah Gistituati. "Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>.
- Hadirman, H. (2021). *SINERGITAS BUDAYA DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA*. Katoba: Jurnal pendidikan, sosial, Budaya, dan Agama, 1(1): 1-10.
- Ismail, S., Suhana, S. dan Zakiah, QY, (2021). *Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila di Sekolah*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), hal.76-84. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.388>
- Kasmeni, Risma, dan Irmawati. "Analisis Peran Manajemen Kebijakan Pendidikan Dalam Mengaplikasikan Visi Dan Misi." *Jurnal Mappesona* 3, no. 3 (2020).
- Kudadiri, Saidup. (2021). *KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM PEMBELAJARAN FULLDAY SCHOOL DI SMP IT NURUL ILMI MEDAN*. *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 6 No.1 (2021) | 1-14 . <http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.1-14>
- Masruri, A. (2019). *LINIERITAS IJAZAH (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan)*. Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i2.56>
- Setiawan, F, Hutami, AS, Riyadi, DS, Arista, VA dan Al Dani, YH, (2021). *Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam*. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 4(1), hal.1-22. <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v11i4.3686>
- Setiawan, Farid, Wildan Taufiq, Ayu Puji Lestari, Risma Ardianti Restianty, dan Lailli Irna Sari. "Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 18, no. 1 (2021): 62–71. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.263>
- Suhelayanti. (2020). *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN*. Lentera: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin Indonesia , 1 (1), 11-26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Tawa, Angelika Bule. "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar." *E-Journal.Stp-Ipi.Ac.Id*, 2019, 107–17.
- Yani, S., Kusen, K., & Khair, U. (2020). *Kebijakan Sekolah Dalam Penerapan Karakter Disiplin Siswa Di SDN 77 Rejang Lebong*. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(3), 99-115. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i3.102>
- Yanti, S. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Lentera: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin Indonesia. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Yulia, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* , 30 (2), 129-153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>